



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408903/2022**



DS:7586-0110-1886-5950

**Revisi ke 12**

Tanggal : 30 November 2022

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
  3. Provinsi : (25) PAPUA
  4. Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 1.240.098.000 ( SATU MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 1.240.098.000  
Rp. 1.240.098.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	1.240.098.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 1.240.098.000

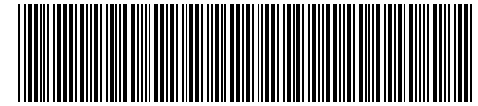
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



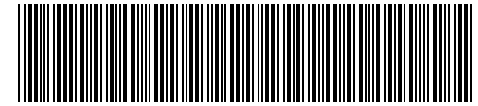
DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.240.098.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	1.240.098.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	14,00	kegiatan	494.975.000	
Rincian Output		:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	14,00	kegiatan	494.975.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	14,00	orang	541.999.000	
Rincian Output		:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	14,00	orang	541.999.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	14,00	operasi	203.124.000	
Rincian Output		:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	14,00	operasi	203.124.000

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022**

**I B. SUMBER DANA**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 Provinsi : (25) PAPUA  
 Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	1.240.098.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.240.098.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA  
Kewenangan : (KD)

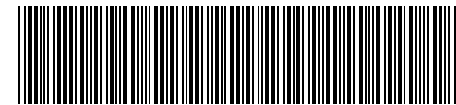
Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408903	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	-	1.240.098	-	-	-	1.240.098		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.240.098	-	-	-	1.240.098		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	1.240.098	-	-	-	1.240.098		
5252.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	494.975	-	-	-	494.975	25 . 51	
01	RM	-	494.975	-	-	-	494.975	063	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	541.999	-	-	-	541.999	25 . 51	
01	RM	-	541.999	-	-	-	541.999	063	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	203.124	-	-	-	203.124	25 . 51	
01	RM	-	203.124	-	-	-	203.124	063	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1.240.098</b>	-	-	-	<b>1.240.098</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (25) PAPUA  
Kode>Nama Satker : (408903) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

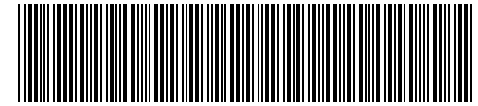
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408903	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA													
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	0	13.810	312.046	12.789	114.745	207.661	51.226	60.903	31.188	53.086	181.351	201.294	1.240.098
		<b>BELANJA BARANG</b>	0	13.810	312.046	12.789	114.745	207.661	51.226	60.903	31.188	53.086	181.351	201.294	1.240.098
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	13.810	312.046	12.789	114.745	207.661	51.226	60.903	31.188	53.086	181.351	201.294	1.240.098
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	13.810	312.046	12.789	114.745	207.661	51.226	60.903	31.188	53.086	181.351	201.294	1.240.098

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
IV A. B L O K I R**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [408903] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408903/2022  
IV B. C A T A T A N**



DS:7586-0110-1886-5950

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [25] PAPUA  
Kode dan Nama Satker : [408903] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NRP 67090332